

**REVITALISASI NILAI-NILAI MUSYAWARAH
PADA MAHASISWA UNS
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PMII KOMISARIAT KENTINGAN DAN
KAMMI KOMISARIAT SHOLAHUDDIN AL-AYYUBI)¹**

Oleh :

Sri Surani, Dewi Gunawati & Moh. Muchtarom²

Email: ri.rani@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The research aims to know: (1) the implementation of musyawarahin campus extra organization in PMII Komisariat Kentingan and KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi; (2) the inhibitor and incentive factors in the revitalization of musyawarah values which are done by PMII Komisariat Kentingan and KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi; (3) the revitalization strategy of musyawarah values by PMII Komisariat Kentingan and KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi.

This research used qualitative research method and case study research approach. Sampling technique which was used was purposive sampling. The technique of collecting data was through observation, interview and documentation. The data validity used triangulation data and triangulation method. The data analysis technique which was used was interactive analysis model include data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The research findings show that (1) The implementation that was done in both organizations have shown the efforts in performing musyawarah values by doing a program or activity like discussion, meeting implementation and chairman election. The specific implementation which was done by PMII Komisariat Kentingan was by forum contract in mapabaand LSO discussion, meanwhile the specific implementation which was done by KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi was through TEKAD and Daurah Marhalah. (2) the inhibitor factors in musyawarah values revitalization generally cover: Lack of confidence, lack of reading habits, time problem, the administrators and members are busy, study oriented and negative feels toward campus extra organization. The incentive factors in PMII Komisariat Kentingan cover, Human Resources, interesting materials, good relations with outsiders and support from the lecturer. The incentive factors in KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi cover: spirit, interesting topics, high criticality, good adaptation and alumnus who contribute. (3) The strategies which were done by PMII Komisariat Kentingan cover: a) Faculty discussion; b) Reviving kader; c) Forming a community; d) Inserting humor in the forum; e) Utilizing da'wah field with cultural approach in religion and education; f) PKM corner; g) Absorbing aspiration; h) Training of basic and

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

aswaja; i) Focus Group Discussion (FGD). Meanwhile, the strategies which were done by KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi cover: a) Trial program and BPO socialization; b) Dwi pekanan discussion; c) MK Khos and MK Klasikal; also e) Making creation.

Keywords: Revitalization, Musyawarah Values, Campus Extra Student Organization

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari peran pemuda. Peranan pemuda terutama mahasiswa saat ini adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, namun perlu dipahami sebagai basis moral bangsa Indonesia. Menurut Danusobroto (2013: 18-19), basis moral yang merupakan nilai-nilai dan sangat diperlukan bagi peradaban bangsa Indonesia yakni nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Kelima nilai-nilai tersebut merupakan basis moral bagi bangsa Indonesia dan sangat diperlukan bagi peradaban bangsa.

Salah satu nilai yang penting dan harus diterapkan dalam kehidupan adalah nilai permusyawaratan. Kehidupan mahasiswa tidak terlepas dari musyawarah. Mahasiswa yang menjadi bagian dari pendidikan Indonesia, seharusnya mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa, sesuai yang tercantum dalam

UURI No. 20 tahun 2003 Pasal 3, di mana pendidikan diharapkan mampu mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Maka dari itu, mahasiswa memiliki peran penting salah satunya adalah untuk menjaga nilai-nilai musyawarah yang meliputi keadilan, kebebasan, dan persamaan dalam setiap aktivitas, meliputi kegiatan kuliah, keikutsertaan dalam organisasi, rapat, seminar, diskusi, dialog maupun pemilihan ketua dalam kehidupan kampus.

Menurut Al Anshari (Hasbi, 2001: 35) musyawarah akan membuahkan hasil yang diharapkan secara optimal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan apabila setiap peserta menjunjung tinggi, menghormati, dan menjaga prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip persamaan ini, menurut Hasbi pada dasarnya bertujuan agar setiap orang atau kelompok mengembangkan prestasinya. Prinsip persamaan ini juga akan menimbulkan sifat saling tolong-menolong dan sifat kepedulian sosial.
2. Nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan

oleh Ibnu Taymiyyah (Hasbi, 2001: 39) adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang telah ditetapkan.

3. Menurut Athiyah al-Abrasyi (Hasbi, 2001: 48), kebebasan dalam bermusyawarah di sini merupakan bebas berpendapat, berdiskusi, pengakuan dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran.

Namun pelaksanaan nilai-nilai musyawarah di kehidupan mahasiswa UNS semakin memudar. Pemaparan Diseminasi Hasil Riset oleh Tim Riset Pengantar Statistik Saudara Subhan dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara (Maryani, 2016: 2), data analisisnya menunjukkan pergerakan generasi muda dalam pergerakan nasional yang ada di Universitas Sebelas Maret, menunjukkan angka 45% yang peduli, 55% lainnya menjawab kurang dan tidak peduli terhadap pergerakan pemuda yang terjadi disekitarnya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa UNS yang mengikuti organisasi intra kampus, bahwa pelaksanaan musyawarah sebenarnya telah diatur

dalam mekanisme rapat dan peraturan pengambilan keputusan, namun dalam pelaksanaannya masih sering menggunakan *voting* dikarenakan untuk mencapai musyawarah mufakat membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini menunjukkan kurangnya pelaksanaan nilai kebebasan pada musyawarah yang salah satu indikatornya adalah mengutamakan mufakat (Hasbi, 2002: 199).

Data lain yang menunjukkan kurangnya pelaksanaan nilai-nilai musyawarah adalah kurangnya nilai kebebasan pada musyawarah dengan indikator kesadaran dalam memilih pemimpin (Hasbi, 2001: 48). Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya keikutsertaan mahasiswa dalam pemilu BEM UNS. Berdasarkan data dari *saluransebelas.com*, pada pemilu 2016 KPU berhasil mengumpulkan 10.292 suara, dan pada pemilu 2017 sebanyak 11.217 suara diperoleh dari total 31.769 mahasiswa aktif dari jenjang diploma dan sarjana (Syaumi, 2016: 4). Selain itu, mahasiswa kurang antusias mengikuti organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan sampel mahasiswa FKIP yang mengikuti organisasi pada tahun 2016/2017 sebanyak 698 dari total mahasiswa aktif FKIP tahun 2016/2017 sebanyak 7622. Padahal keikutsertaan dalam organisasi merupakan pelaksanaan nilai persamaan dalam musyawarah dengan indikator mengembangkan

prestasi melalui penyaluran aspirasi, minat dan bakat (Hasbi, 2001: 27). Organisasi sangat penting untuk menumbuhkan musyawarah dan nilai-nilai musyawarah. Kawamura (2011: 5) menyebutkan bahwa musyawarah-mufakat dianggap sebagai budaya, dan Koentjaraningrat (2000: 182) mengemukakan bahwa salah satu unsur dari kebudayaan adalah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa musyawarah sebagai budaya dapat dibentuk salah satunya melalui organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai musyawarah, maka diperlukan revitalisasi nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan mahasiswa agar mahasiswa sebagai penerus bangsa tidak kehilangan jati diri dan tidak kehilangan nilai musyawarah. Musyawarah yang nilai-nilainya telah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia sejatinya menjadi tanggung jawab pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan melaksanakannya, agar kelak esensi dari musyawarah tidak pudar. Dalam hal ini dikhususkan pada mahasiswa UNS.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami: (1) implementasi musyawarah di organisasi ekstra kampus PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi. (2) untuk menjelaskan

faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam revitalisasi nilai-nilai musyawarah yang dilakukan PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi. (3) Untuk mengetahui strategi revitalisasi nilai-nilai musyawarah PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini mengemukakan obyek yang diteliti berdasarkan fakta serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berkaitan dengan obyek penelitian yakni revitalisasi nilai-nilai musyawarah pada mahasiswa UNS (Studi Komparatif antara PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi).

A. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini ada tiga sumber data yaitu informan kunci (key informan), tempat dan peristiwa serta dokumen, dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu memilih informan dengan pertimbangan tertentu. Informan yang dipandang mengetahui permasalahan secara

mendalam dan dapat dipercaya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah (a) Ketua, Koor Bidang Kaderisasi, dan tiga anggota PMII Komisariat Ketingan; (b) Ketua, Koor Bidang Sekretaris Umum, Koor Bidang Jaringan dan Fakultas, Koor Bidang Kaderisasi, Koor Bidang Kajian Publik, alumni bidang kaderisasi, dan dua anggota KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi; (c) dua orang mahasiswa UNS yang pernah mengikuti kegiatan kedua organisasi tersebut serta FA selaku Dosen FISIP UNS.

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu sekretariat PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas dari musyawarah.

3. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan Arsip yang digunakan peneliti sebagai sumber data antara lain:

- a. AD/ART PMII
- b. AD/ART KAMMI
- c. Mekanisme forum; Mekanisme pemilihan pimpinan sidang tetap; Draft Tata Tertib; Rancangan ketetapan komisi, Tatib pemilihan ketua umum dan formatur PMII Komisariat Ketingan
- d. Tatib Musyawarah Kerja, Tatib Rapat Pleno I KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi.

B. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, di mana peneliti cenderung memilih informan yang memahami mengenai bahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan memilih informan yang dapat memberikan informasi permasalahan tentang upaya dalam merevitalisasi nilai-nilai musyawarah pada mahasiswa UNS.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data meliputi:

1. Wawancara, sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2008: 72).

2. Observasi

Peneliti memilih menggunakan observasi berperan pasif karena dalam kegiatan kedua organisasi tersebut peneliti menjaga obyektivitas dengan tidak memiliki hak suara dan hak bicara, sehingga peneliti hanya mengamati hal-hal tertentu pada kedua organisasi tersebut.

3. Dokumen

Sugiyono (2008: 82) menyatakan bahwa "Dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

D. Teknik Uji Validitas Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Peneliti menggunakan triangulasi metode dikarenakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan keabsahan data. Sedangkan dari triangulasi sumber data, peneliti menggunakan tiga sumber data yakni informan, tempat dan peristiwa serta dokumen dan arsip.

E. Teknik Analisis Data

Sutopo (2002: 91) menyatakan, “Dalam proses analisis terdapat empat komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen utama tersebut adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur,

sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur.

2. Reduksi Data

“Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan” (Sutopo, 2002: 92).

3. Sajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah penyusunan sekumpulan data yang telahh direduksi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tindakan penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, table dan diagram.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan harus senantiasa diverifikasi agar lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setelah analisis dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diawali dengan melakukan wawancara dengan narasumber serta melakukan observasi terkait musyaarah yakni RTAR di PMII Rayon Ki Ageng Selo yang merupakan bagian dari PMII Komisariat Kentingan pada tanggal 9-

11 Juni 2017 serta rapat BPH yang membahas halal bihalal yang dilakukan oleh KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi. Selain itu juga menggunakan dokumen diantaranya, AD/ART PMII, AD/ART KAMMI, Peraturan RTAR yang meliputi: Mekanisme forum; Mekanisme pemilihan pimpinan sidang tetap; Draft Tata Tertib; Rancangan ketetapan komisi, Tatib pemilihan ketua umum dan formatur dan Tatib Musyawarah Kerja dan Tatib Rapat Pleno I KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi.

Implementasi Musyawarah di Organisasi Ekstra Kampus PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi

Implementasi yang dilakukan oleh PMII Komisariat ditunjukkan dengan adanya program atau kegiatan yakni, diskusi meliputi diskusi rutin, insidental dan OKP data ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus. Pelaksanaan rapat yang meliputi rapat tindak lanjut, RTK (Rapat Tahunan Komisariat) dan RTAR. Selain itu juga terdapat pelaksanaan pemilihan ketua kontrak forum dalam Mapaba, Tabel musyawarah di LSO. Program kegiatan yang dilakukan tersebut telah diusahakan

pelaksanaannya menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Hal ini didapatkan dari hasil observasi saat mengamati RTAR PMII Rayon Ki Ageng Selo.

Implementasi musyawarah kedua organisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan proses pendidikan yakni melalui kegiatan diskusi, pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan kontrak forum. Implementasi musyawarah melalui kepemimpinan telah dilaksanakan dengan kegiatan pemilihan ketua komisariat dan rayon, musyawarah di LSO, TEKAD (Temu Kader) dan DM (Daurah Marhalah) dan penggunaan media sebagai salah satu cara menyebarluaskan informasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kawamura (2011: 5) menyebutkan bahwa musyawarah-mufakat dianggap sebagai budaya selanjutnya Layaman,dkk (2011: iv-v) menyatakan bahwa kesadaran dalam mengimplementasikan budaya dapat melalui proses pendidikan, kepemimpinan serta campur tangan media. Lebih rinci dijabarkan dalam tabel 1, sebagai berikut:

1. Perbandingan Implementasi Musyawarah PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi

PMII Komisariat Kentingan

KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi

- | | |
|---|---|
| <p>a. Diskusi meliputi:
Diskusi rutin,
Diskusi Insidental,
Diskusi dengan OKP</p> <p>b. Pelaksanaan rapat, meliputi:
Rapat Tindak Lanjut,
RTK (Rapat Tahunan Komisariat)
RTAR (Rapat Tahunan Anggota Rayon)</p> <p>c. Pemilihan Ketua, di PMII
Komisariat Ketingan perempuan pernah menjadi ketua.</p> <p>d. Kontrak Forum dalam Mapaba,</p> <p>e. Musyawarah di LSO.</p> | <p>a. Diskusi meliputi:
Diskusi integrative fakultas,
Diskusi aksi,
Diskusi dengan OKP</p> <p>b. Pelaksanaan rapat, meliputi:
Muskom (Musyawarah Komisariat)
Rapat BHP.</p> <p>c. Pemilihan Ketua, di KAMMI
Sholahuddin Al-Ayyubi ketua diusahakan laki-laki.</p> <p>d. TEKAD (Temu Kader),</p> <p>e. DM (Daurah Marhalah),</p> |
|---|---|

Berdasarkan tabel 1, perbandingan implementasi nilai-nilai musyawarah kedua organisasi tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar musyawarah yang meliputi: (1) prinsip persamaan, menurut Hasbi (2001, 35) yang pada dasarnya bertujuan agar setiap orang atau kelompok dapat mengembangkan prestasinya dengan wajar dan layak. Prinsip persamaan ini juga akan menimbulkan sifat saling tolong-menolong dan sifat kepedulian sosial dalam ruang lingkup yang luas; (2) Nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyyah (Hasbi, 2001: 39) keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah,

bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang telah ditetapkan; (3) kebebasan, menurut Athiyah al-Abrasyi (Hasbi, 2001: 48), kebebasan dalam bermusyawarah di sini merupakan bebas berpendapat, berdiskusi, pengakuan dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran.

Deskripsi Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Revitalisasi Nilai-nilai Musyawarah yang dilakukan PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi

Penemuan hambatan dalam pelaksanaan musyawarah dan revitalisasi musyawarah sesuai dengan teori budaya organisasi Pacanowsky dan O'Donnell Trujillo (Richard dan Lynn, 2008: 325). Temuan hambatan ini termasuk dalam asumsi ketiga yang membahas mengenai budaya setiap organisasi bervariasi dan interpretasi tindakan dalam budaya juga beragam. Pada asumsi ketiga ini ada hal penting

yang harus diamati salah satunya berkaitan dengan masalah di dalam suatu organisasi dikarenakan masalah akan mempengaruhi interpretasi tindakan c organisasi dan akan berpengaruh

budaya setiap organisasi. Selanjutnya aspek tersebut dapat dijabarkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Revitalisasi Nilai-nilai Musyawarah pada PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi

Faktor	PMII Komisariat Ketingan	KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi
Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya rasa percaya diri dari beberapa anggota; b. Kurangnya kebiasaan membaca; c. Waktu pelaksanaan yang kurang tepat; d. Kesibukan anggota dan pengurus PMII; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu pelaksanaan yang kurang tepat; b. Masih ada yang belum menyampaikan pandangan; c. Kesibukan dari pengurus dan anggota; d. Pandangan negatf terhadap KAMMI, karena tidak semua mahasiswa menerima organisasi ekstra kampus; e. Situasi pergerakan yang lebih kendor dan sikap kampus yang represif; f. Kebanyakan mahasiswa lebih menekankan pada <i>study oriented</i>; g. Pandangan orang luar tentang <i>hijab</i> saat musyawarah.
Pendukung:	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM PMII Komisariat Ketingan; b. Dialektika yang berkembang serta kajian yang menarik; c. Luasnya dan dukungan dari dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya semangat dan kesesuaian jadwal; b. Tema diskusi yang menarik; c. Tingkat kekritisn yang tinggi; d. Adaptasi yang baik dan alumni yang turut andil.

Deskripsi Strategi Revitalisasi Nilai-nilai Musyawarah yang dilakukan PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi

Strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selain itu, startegi juga merupakan suatu tindakan yang

mendasari pencapaian keberhasilan suatu program atau kebijakan, sehingga tingkat kegagalannya dapat diantisipasi (Djamarah, Bahri & Aswan Zain 2013: 5).Berkaitan dengan teori budaya organisasi Pacanowsky dan O'Donnell Trujillo (Richard dan Lynn, 2008: 325). Temuan strategi ini termasuk dalam asumsi ketiga yang membahas mengenai "budaya setiap organisasi bervariasi dan interpretasi tindakan

dalam budaya juga beragam". Pada asumsi ketiga ini ada hal penting yang harus diamati yakni berkaitan dengan pertanyaan 'bagaimana hal ini diatasi?' serta 'strategi apa yang digunakan?'. Dua pertanyaan tersebut merupakan bagian penting pada asumsi ketiga teori budaya organisasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya mengenai hambatan.

Selain itu, organisasi kemahasiswaan dikelola dengan model manajemen strategis (*strategic management*) dengan dua tujuan yaitu: agar organisasi mahasiswa dapat terus berkembang serta menjadi sarana pengembangan kemampuan manajemen dan kepemimpinan organisasi bagi mahasiswa (Abdul, 2013: 1). Manajemen strategis dalam implementasinya memuat empat fungsi pokok manajemen (Abdul, 2013: 3), hal ini telah ditunjukkan oleh PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi yaitu:

a. perencanaan (*planning*) yang ditunjukkan melalui Rapat Pleno BPH PK PMII dan Rapat Tahunan Komisariat yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berfungsi untuk membahas hal-hal strategis dan menetapkan keputusan untuk merespon berbagai dinamika organisasi baik bersifat internal maupun eksternal. Serta pelaksanaan RTK yang telah

diatur dalam Pasal 45 point (6a). Pada KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Komisariat seperti yang tercantum dalam ART Pasal 56 ayat 3 yakni "menetapkan panduan kerja komisariat". Pada proses perencanaan ini, kedua organisasi menentukan program kerja yang nantinya menjadi panduan dalam mencapai tujuan.

b. pengorganisasian (*organizing*) ditunjukkan dengan adanya susunan kepengurusan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi.

c. pengarahan dan implementasi (*actuating*) ditunjukkan dengan berbagai strategi yang dilakukan melalui program kerja baik PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi.

d. pengawasan dan pengendalian (*controlling*) dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun kepengurusan yang mana di PMII dilaksanakan pada Rapat Tahunan Komisariat (RTK) seperti yang tercantum dalam ART Pasal 45 point (6b) bahwa "menilai laporan pertanggung jawaban pengurus komisariat". Pada KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi dilakukan pada akhir kepengurusan dalam kegiatan Musyawarah Komisariat seperti

yang ditercantum dalam ART Pasal 56 ayat 1 yakni "Meminta dan menilai LPJ Pengurus Komisaria KAMMI". Pengawasan dan pengendalian ini sebagai bahan evaluasi untuk menilai seberapa berhasilnya kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi target dalam mencapai tujuan. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan dipertengahan periode dan akhir periode kepengurusan.

Strategi yang dilaksanakan PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi telah menunjukkan pelaksanaan revitalisasi epistemologis dan revitalisasi pada tingkat penjabaran normatif. Menurut Kaelan (2014: 138-139) bahwa revitalisasi epistemologis ini yakni revitalisasi untuk tetap menjaga dan mengembangkan dengan melibatkan proses pendidikan. Revitalisasi berikutnya yakni revitalisasi pada tingkat penjabaran normatif yaitu dalam konteks pelaksanaan negara secara normatif. Revitalisasi ini dijelaskan oleh Armawi (2007: 35-36) bahwa pada tingkat ini harus dikembangkan derivasi nilai-nilai Pancasila. Pada taraf berikutnya adalah melakukan implementasi dan kontekstualisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Revitalisasi epistemologi ditunjukkan melalui kegiatan diskusi, menghidupkan kader, PKM Corner, serap aspirasi, pelatihan basis dan

aswaja, FGD, sosialisasi BPO, MK Khos dan MK Klasikal revitalisasi normatif ditunjukkan melalui kegiatan membentuk komunitas, pemanfaatan ladang dakwah, serap aspirasi, pelatihan basis dan aswaja, dan pengkaryaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi musyawarah yang dilakukan oleh PMII Komisariat Ketingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Secara umum kedua organisasi tersebut melakukan musyawarah dalam bentuk diskusi, rapat dan pemilihan ketua. Walaupun ada beberapa program khusus dalam implementasi musyawarah yang hanya dimiliki oleh masing-masing organisasi yakni pelaksanaan kontrak forum dan musyawarah di LSO yang dilaksanakan oleh PMII Komisariat Ketingan serta pelaksanaan TEKAD dan DM yang dimiliki oleh KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi. Nilai keadilan ditunjukkan dengan adanya aturan mengenai hak dan kewajiban. Nilai kebebasan adanya hak suara dan pendapat bagi pengurus dan anggota serta hak pendapat tanpa hak suara bagi peninjau, dan tidak adanya tekanan saat pelaksanaan

musyawarah. Implementasi nilai-nilai musyawarah di KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi yakni nilai persamaan ditunjukkan dengan sikap persaudaraan, dan dalam memilih ketua diusahakan laki-laki, nilai keadilan ditunjukkan dengan sikap yang tertib dan aman, adanya peraturan mengenai hak dan kewajiban, nilai kebebasan ditunjukkan dengan musyawarah mufakat dalam pelaksanaannya.

2. Hambatan yang dihadapi kedua organisasi secara umum meliputi waktu pelaksanaan yang kurang tepat, kesibukan dari pengurus dan anggota, masih ada yang belum menyampaikan pandangan, kurangnya kebiasaan membaca, pergerakan dirasa kendor, dan pandangan negatif terhadap organisasi ekstra kampus. Sedangkan faktor pendukung secara umum meliputi SDM organisasi, kajian yang menarik, luasnya hubungan dengan pihak luar dan dukungan dari dosen.
3. Strategi yang dilakukan oleh PMII Komisariat Kentingan meliputi, diskusi bulan ramadhan, menghidupkan kader, membentuk komunitas, penggunaan humor, pemanfaatan ladang dakwah dengan pendekatan kultural agama dan pendidikan, PKM Corner, Serap Aspirasi, Pelatihan basis dan aswaja dan FGD.

Sedangkan yang dilakukan oleh KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi meliputi program persidangan dan sosialisasi BPO, diskusi dwipekanaan, *timing* musywarah, MK Khos dan MK Klasikal, pengkaryaan.

Saran

1. Memperbaiki internal organisasi dan menjaga komunikasi dengan baik agar musyawarah dapat berjalan dengan maksimal.
2. PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi menunjukkan eksistensi dengan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat serta berusaha menghilangkan anggapan bahwa organisasi ekstra kampus berkaitan dengan politik praktis.
3. PMII Komisariat Kentingan dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi menjaga kerjasama dengan OKP dalam menghidupkan suasana pergerakan bersama-sama sehingga memudahkan peran organisasi untuk menumbuhkan musyawarah pada mahasiswa UNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Dindin. (2013). *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Kemahasiswaan*. Materi Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM), UPI, 9 Oktober 2013.

- Armawi, Armaidly. (2007). Pancasila Sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hankamnas. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XII (1), April 2007, hal. 35-36. Diperoleh pada 14 Juni 2017, dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22114/14762>.
- Danusubroto, Sidarto. (2013). Membumikan Empat Pilar Menjaga Eksistensi Bangsa. *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia NEGARAWAN*, No. 28, 18-19.
- Hasbi, Artani. (2001). *Musyawah dan Demokrasi: Anaisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Pamulang: Penerbit Gaya Media Pratama.
- Kaelan. (2014). Pembudayaan Pancasila. *Prosiding Kongres Pancasila VI Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Perlembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*, hlm.138-139, Universitas Pattimura, Ambon.
- Kawamura, Koichi. (2011). Consensus and Democracy in Indonesia: Musyawarah-Mufakat Revisited, *Ide Discussion Paper No. 308*, 4-5.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Layaman, Hypolitus dkk. (Eds). (2011). Pancasila, Negara Kesejahteraan dan Ketahanan Masyarakat. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik* Edisi 2/Agustus/2011, hlm. 35-36.
- Maryani. (2016, 20 September). Diskusi Publik dan Diseminasi Hasil Riset Pergerakan Mahasiswa. *FISIP UNS*. Diperoleh pada 28 Desember 2016, dari <http://fisip.uns.ac.id/2016/09/20/diskusi-publik-dan-diseminasi-hasil-riiset-pergerakan-mahasiswa/>.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo.(2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain. (2013). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syaumi, K.N. (2016, 15 November). Belum Capai Target, Ketua KPU: Kami Cukup Puas. *Saluran Sebelas*. Diperoleh pada 28 Desember 2016, dari <https://saluransebelas.com/belum-capai-target-suara-ketua-kpu-kami-cukup-puas/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

West, Richard and Lynn H. Turner.
(2008). *Teori Komunikasi
Analisis dan Aplikasi*. Jakarta:
Salemba Humanika.

JURNAL EDUCITIZEN